

MASIH TENTANG DEMOKRASI

@Dr. Sodikin

Salah satu tuntutan reformasi sejak tahun 1999 adalah penguatan demokrasi, karena pada rezim pemerintahan orde baru demokrasi tidak menjadi bagian dari sistem pemerintahan yang dijalankan. Era reformasi ini semua penyelenggaraan negara didasarkan pada demokrasi, semua orang berbicara tentang demokrasi dan mengatasnamakan demokrasi, sehingga dikenallah proses demokratisasi di semua aspek kehidupan, dan sekarang ini negara kita menganut sistem pemerintahan demokrasi. Selanjutnya apa itu demokrasi yang sekarang menjadi perhatian serius bagi bangsa ini.

Penulis mencoba menelusuri dalam literatur istilah demokrasi bahwa ditinjau dari sudut etimologi, kata demokrasi berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *cratein* yang berarti pemerintah. Begitu juga menurut pakar politik Henry B Mayo bahwa demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Dengan demikian, kata demokrasi itu berarti “pemerintahan oleh rakyat” yang dalam perkembangan selanjutnya, seperti dilihat di dalam *Declaration of Independence* adalah *of the people, for the people and by the people*. Apabila kata demokrasi itu ditinjau dari arti kata-katanya, maka hal itu tidaklah mungkin diwujudkan, oleh karena adalah mustahil orang yang berjumlah lebih banyak memerintah orang yang lebih sedikit.

Dalam literatur juga ditemukan bahwa Aristoteles dalam membicarakan bentuk-bentuk pemerintahan yang ada dan yang seharusnya berlaku, seperti dikemukakan dalam bukunya C.F. Strong yang berjudul *Modern Political Constitutions*, yang kemudian dijelaskan kembali oleh Prof. Sri Soemantri yang beranggapan bahwa demokrasi itu termasuk salah satu bentuk pemerosotan. Landasan dari teori Aristoteles adalah bahwa bentuk-bentuk pemerintahan itu harus berlandaskan pada dua alternatif yaitu *Good and Bad* yang kemudian diperinci lagi:

Government by	Good	Bad
one	monarchy	tyrany
few	aristocracy	oligarchy
many	polity	Democracy

Demikianlah menurut Aristoteles, demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan yang kemudian mengalami pemerosotan. Bahkan kemudian, demokrasi itu disebut dengan istilah *mobocracy, the rule of the mob*, yaitu suatu pemerintahan yang dilakukan oleh massa. Dengan demikian terjadilah *anarchy* (tanpa ada pemerintahan).

Hal ini ada hubungannya dengan teori *cyclus* dari Polybios yang mengatakan bahwa mula-mula pemerintah itu berbentuk *monarchy*, tetapi kemudian karena manusia itu tidak sama sifatnya, maka apabila keturunan raja yang memerintah itu kemudian menggantikannya dan memerintah dengan sewenang-wenang maka timbullah suatu *tyrany*, yaitu di mana raja itu hanya memperhatikan kepentingan-kepentingannya sendiri. Kemudian di antara kaum bangsawan timbul perasaan tidak puas dan menggulingkan raja tersebut sehingga terjadilah *aristocracy*, karena manusia tidak mempunyai sifat-sifat yang sama serta tidak abadi, timbullah *oligarchy*, yaitu pemerintahan oleh sekelompok orang untuk kepentingan mereka sendiri. Tetapi kemudian pemerintah yang demikian ini akan ditentang oleh rakyat sehingga timbullah *democracy* dan seterusnya.

Oleh karena itu dapatlah dimengerti, mengapa seorang sarjana Perancis yang bernama Maurice Duverger di dalam bukunya *Les Regimes Politiques*, mengatakan: "kalau menurut arti kata seperti yang diartikan oleh umum, maka demokrasi yang sungguh-sungguh tidaklah pernah ada dan tidak mungkin ada. Adalah bertentangan dengan kodrat alam bahwa golongan yang berjumlah terbesar memerintah, sedangkan yang sedikit jumlahnya harus diperintah".

Dalam literatur lain juga dikemukakan oleh Plato bahwa ada 6 macam bentuk negara sesuai dengan sifat tertentu dari jiwa manusia:

1. *Aristokrasi*, pemerintahan dipegang oleh sekelompok kecil para cerdik pandai berdasarkan keadilan. Kemosrotan dari aristokrasi ini menjadi *Timokrasi*
2. *Timokrasi*, Pemerintahan dijalankan untuk mendapatkan kekayaan untuk kepentingan sendiri. Oleh karena kekayaan untuk kepentingan sendiri lalu jatuh

dan dipegang oleh kelompok hartawan, sehingga yang berhak memerintah adalah orang yang kaya saja timbullah *oligarchi*;

3. *Oligarchi*, pemerintahan dijalankan oleh sekelompok orang yang memegang kekayaan untuk kepentingan pribadi. Timbul kemelaratan umum. Banyak orang miskin, tekanan penguasa semakin berat, rakyat semakin sengsara. Akhirnya rakyat sadar dan bersatu memegang pemerintahan. Timbullah *Demokrasi*;
4. *Demokrasi*. Pemerintahan secara demokrasi diutamakan kemerdekaan dan kebebasan. Oleh karena kebebasan dan kemerdekaan ini terlalu diutamakan timbul kesewenang-wenangan. Kemerdekaan dan kebebasan menjadi tidak terbatas. Lalu timbullah prinsip *Anarki*;
5. *Anarchi*, pemerintahan anarki seseorang dapat berbuat sesuka hatinya. Rakyat tidak mau lagi diatur, karena ingin mengatur dan memerintah sendiri. Negara menjadi kacau. Untuk itu perlu pemimpin yang keras dan kuat. Akhirnya timbullah *Tirany*;
6. *Tirany*. Pemerintahan dipegang oleh seorang saja dan tidak suka terdapat persaingan. Semua orang yang menjadi saingan disingkirkan dan dasingkan. Pemerintahan ini tambah jauh dari keadilan. Begitu seterusnya kembali pada bentuk negara semula.

Hal ini berarti dari sekian bentuk negara tersebut tidak ada bentuk yang paling sempurna, tetapi dari sekian bentuk negara tersebut negara Indonesia sejak awal kemerdekaan telah menganut demokrasi, tetapi demokrasi yang dianut bermacam-macam bentuk dan polanya sesuai dengan zamannya dan era reformasi inilah penguatan demokrasi sesuai dengan liberalisasi kehidupan manusia.

Wallahu a'lam bishawab.

@Penulis adalah Dosen FH UMJ dan FSH UIN Jkt.